

Judul : Ibu Kota Baru perlu sosialisasi gencar
Tanggal : Senin, 31 Januari 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 4

Ibu Kota Baru Perlu Sosialisasi Gencar

ASN yang akan ditugaskan di Nusantara perlu diberikan waktu untuk mempersiapkan diri. Hal itu mengingat jumlahnya yang besar.

CAHYA MULYANA
cahya@mediaindonesia.com

SEMUA pihak diminta memberikan waktu kepada pemerintah untuk memaparkan berbagai rencana terkait pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur. Pro dan kontra tidak memberikan manfaat, sedangkan pemindahan ibu kota memang diperlukan.

"Saya melihat ini sedang berproses dan nantinya bagaimana sosialisasi serta pemerintah atau stakeholder terkait memberikan penjelasan lebih detail kepada publik," tutur Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat.

Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, salah satu tujuan dari pemindahan IKN ialah membangun identitas bangsa Indonesia dan memperkuat posisi di mata dunia. "Jadi, sebaiknya pro dan kontra ini kita hindarkan," tegasnya Rerie.

Politikus NasDem itu mengatakan pemerintah mempunyai tugas besar dalam meyakinkan pihak-pihak yang tidak sependapat atau menolak pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. Seiring dengan itu, pendekatan adat dan budaya harus terus diintensifkan dalam rangka pembangunan IKN Nusantara yang berada di Kalimantan Timur.

"Pendekatan budaya dan sosial harus dikedepankan agar manfaat dari pembangunan tersebut dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat," ujar Rerie.

Menurut dia, sosialisasi pemindahan IKN harus lebih digencarkan. Pemerintah, diyakini Rerie, telah memiliki langkah-langkah strategis dalam menerapkan pemindahan ibu kota.

Senada, Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar meminta pemerintah menyosialisasikan Undang-Undang (UU) IKN dengan membentuk tim sosialisasi terbaik untuk memberikan penjelasan kepada publik. Dengan demikian, tidak terjadi kesalahan dalam menyosialisasikan UU IKN tersebut, termasuk menyegerakan penyusunan aturan turunan.

Menurut Muhaimin yang juga akrab disapa Cak Imin, pemerintah harus membuat analisis dampak lingkungan hidup (AMDAL) dan kajian sosiologis, baik terhadap warga lokal atau masyarakat adat maupun terhadap aparat sipil negara (ASN) yang akan dipindahkan. "Ini penting dilakukan agar tidak terjadi

kesenjangan sosial serta menimbulkan masalah baru di kemudian hari," ujarnya.

Ketua Umum Partai kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut mengatakan ASN yang akan ditugaskan di IKN baru perlu diberikan waktu untuk mempersiapkan diri. Hal itu mengingat jumlahnya yang besar, diperkirakan 116.157 ASN pusat dan 2.356 pejabat struktural.

Akademisi dari Universitas Cenderawasih Septinus Saa mendukung langkah visioner pemerintah untuk memindahkan IKN. Ia juga mencontohkan bagaimana tata kelola pemerintahan di Australia menjadi lebih baik setelah ibu kota berpindah dari Sydney ke Melbourne.

"Kita melihat kepadatan penduduk di Jawa, terutama Jakarta. Selain itu, faktor lingkungan juga terpengaruh di mana sekarang banyak terjadi musibah. Hal ini menjadikan Jakarta tidak ideal lagi sebagai Ibu Kota," kata Septinus.

Wewenang Presiden

Dalam hal penunjukan Kepala Otorita Nusantara, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut partainya memiliki kader-kader kompeten yang dinilai layak menjadi Kepala Badan Otorita IKN.

Hal itu ia ungkapkan menanggapi sederet nama kader PDIP yang muncul ke publik, dari Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok, Mensos yang juga mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, hingga Wali Kota Semarang Hendrarprahadi.

"Semuanya adalah kader PDIP yang dianggap sangat berprestasi sebagai kepala daerah," ungkap Hasto.

Kendati demikian, Hasto menuturkan bahwa penunjukan Kepala Otorita IKN merupakan kewenangan penuh dari Presiden Jokowi.

Cak Imin pun meyakini Presiden Jokowi bakal menunjuk calon yang cakap untuk mengisi posisi Kepala Otoritas Nusantara. Pejabat itu akan bertanggung jawab dari supervisi persiapan pemindahan hingga penyelenggaraan pemerintahan setempat.

Ia lantas mengingatkan pemerintah memiliki waktu dua bulan setelah UU IKN diundangkan. "Saya yakin Pak Presiden sudah menyiapkan nama terbaik untuk ditugaskan sebagai Kepala IKN," urainya. (Pra/P-2)



Sumber: BPS RI dan BPS Meksiko, SEND

Ada Potensi Buang-Buang Uang



Ridho Alhamdi

Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)

BAGAIMANA Anda melihat proses penyusunan UU Ibu Kota Negara (IKN)?

Harus diakui, proses penyusunan UU ini mengejutkan banyak pihak walaupun pihak yang mendukung menyatakan UU ini pernah diwacanakan presiden-presiden sebelum Joko Widodo. Apalagi, prosesnya yang begitu cepat dan terkesan tergesa-gesa. Hal ini kemudian memunculkan anggapan di publik bahwa Jokowi akan melakukan berbagai cara apa pun demi mewujudkan cita-citanya untuk meninggalkan *legacy* ketika selesai menjabat.

Apakah memang pembahasannya juga tidak banyak melibatkan publik?

Itulah yang kita agak sesalkan. Karena ingin cepat tuntas, penyusunan UU ini sepertinya minim partisipasi publik, sekaligus juga menunjukkan kalau Jokowi lebih mengutamakan pemodal dalam proses pembangunan di negara ini.

Ini membuktikan kalau Jokowi tidak terlalu peduli dengan demokrasi dalam merencanakan pembangunan. Apalagi, selama masa Jokowi, kita menyaksikan banyak korupsi yang dilakukan penguasa terhadap para pengkritik, baik dari kalangan akademisi, aktivis, masyarakat sipil, maupun mahasiswa. Praktik pembungkaman ini hanya demi memuluskan manuver para pemodal.

Bukannya masih ada alternatif *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan UU ini?

Memang masih ada kemungkinan ini. Apalagi, berkaca ke UU Cipta Kerja yang akhirnya ditunda pemberlakuannya akibat proses penyusunannya yang tidak demokratis. Walaupun saya agak menyangsikan *judicial review* ini, jika dilihat dari komposisi hakim MK yang ada saat ini, tidak ada salah kita coba untuk melakukan *judicial review*.

Apakah tidak ada upaya lain?

Saat ini, kan, sudah dimulai gerakan masyarakat sipil dan kalangan kampus untuk membangun opini demi menggagalkan UU yang tidak demokratis. Walaupun oposan di kalangan akademisi dan mahasiswa semakin minim jumlahnya, kalangan kampus tetap melakukan konsolidasi untuk melawan UU ini. Begitupun dengan pelibatan media yang kritis tentunya.

Jika UU ini tetap diberlakukan, bukankah masih bisa dibatalkan presiden mendatang?

Nah, itu juga yang saya khawatirkan. Kalaupun tetap jalan selama rezim Jokowi, publik masih mempunyai kesempatan untuk menggagalkan UU ini setelah 2024. Ini dengan asumsi apabila peta politik pasca-2024 mengalami perubahan. Namun, kita akan menyangkan kalau batalnya setelah 2024 sebab sudah banyak dana publik dari APBN yang digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur IKN. Buang-buang uang. Ini yang kita hindari. (Che/P-2)

Transformasi Besar sedang Dilakukan



Wandy Tuturoong

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP)

PEMINDAHAN ibu kota sampai saat ini masih mendapat sorotan dan sebagian belum yakin ke depannya. Bagaimana meresponsnya?

Ada pepatah yang mengatakan *seeing is believing*. Artinya, kita menjadi yakin dan percaya setelah melihat dengan mata kepala sendiri. Di situlah makna transformasi besar yang sedang dilakukan.

Contoh, pembangunan tol lintas Jawa dan Sumatra. Pembangunan akturnya membuat publik percaya dan optimistis perubahan dan kemajuan bisa dicapai.

Transformasi seperti apa?

Transformasi yang dilakukan melalui pemindahan IKN (ibu kota negara) merupakan salah satu cara yang paling tepat. Transformasi ini untuk mempersiapkan pola pikir para pemimpin muda agar yakin dan mampu meneruskan serta mewujudkan transformasi besar yang sama-sama dicita-citakan seluruh bangsa.

IKN merupakan *showcase* yang kita butuhkan untuk mewujudkan Indonesia Maju 2045. Tantangannya tidak mudah, tapi kalau kita bersatu, kita bisa.

Bagaimana menyakinkan publik soal urgensinya?

Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur bertujuan mewujudkan semangat Indonesia sentris. Selama ini, pembangunan dan hasilnya terlalu berat ke (wilayah) barat, khususnya Jawa. Ini memunculkan istilah Jawa sentris, akan terus seperti ini kalau kita tidak melakukan perimbangan pembangunan.

Perimbangannya seperti apa?

Dengan adanya pemindahan IKN, episentrum pembangunan akan diseimbangkan, akan muncul episentrum pembangunan baru di Kalimantan dan Sulawesi. Jarak ketertinggalan dari Indonesia bagian barat dan Jawa bisa lebih pendek. Pemindahan IKN juga bagaimana mewujudkan cita-cita Indonesia Maju pada 2045.

Bagaimana melihat perdebatan yang terjadi?

Masyarakat yang salah persepsi atau belum mengetahui soal visi dan alasan pemindahan IKN perlu mendapatkan sosialisasi. Sejumlah negara berhasil memindahkan ibu kota negara, seperti Kazakhstan, Brasil, Malaysia, Australia, dan Amerika Serikat.

Apakah pemerintah yakin pemindahan IKN ke Nusantara akan berhasil seperti di negara-negara tersebut?

Semua memang punya konteks yang berbeda masing-masing, tapi kita juga punya konteks dan kita yakin pilihan pemindahan IKN itu akan membawa kebaikan dan kemajuan bangsa, terutama menyambut 100 tahun Indonesia pada 2045. (Dhk/P-2)